BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan pada Desa Sanbet Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Partisipasi masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan di unit pelayanan pajak dan retribusi daerah dapat dibilang cukup efektif akan tetapi petugas masih menemukan beberapa kendala antara lain, masyarakat selaku wajib pajak kurang akan pengetahuan pentingnya membayar pajak, serta manfaat atas pembayaran pajak itu sendiri. Sebagian masyarakat belum membayar pajak tepat waktu, hal ini menyebabkan terjadinya penunggakan hutang PBB-P2. Sebagian besar wajib pajak kurang aktif dalam melaporkan perubahan objek maupun subjek pajaknya sehingga data kepemilikan tidak update. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, petugas setempat selaku pemerintah daerah, telah melakukan berbagai upaya untuk masyarakat selaku wajib pajak memahami pentingnya membayar pajak terutama pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, melalui sosialisasi yang dilakukan beberapa kali dalam setahun melalui tingkat kelurahan atau kecamatan, serta menghimbau masyarakat melalui selebaran serta memasang spanduk dan baliho di

beberapa titik ruas jalan agar masyarakat dapat mengingat kewajiban membayar pajak dan pentingnya membayar pajak serta petugas juga telah melakukan tinjau lapangan untuk memastikan objek maupun subjek pajak sesuai.

5.2 Implikasi Teoritis

Dalam (Amin et al., 2018) Partisipasi masyarakat merupakan masyarakat yang terlibat dalam menentukan arah, skema dalam kebijakan kegiatan, mengemban tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan, serta memperoleh hasil dan manfaat secara menyeluruh. Keterlibatan masyarakat pada hakekatnya merupakan partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara luas atau dengan pemerintah sedapat mungkin dalam perihal membantu dan memberikan angan - angan untuk meningkatkan, mempercepat, memfasilitasi, dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang memiliki sifat kebendaan yang berarti besar pajak yang sesuai ditetapkan dengan kondisi objek pajak yaitu bumi dan bangunan. PBB yaitu pajak yang secara luas difokuskan dan dikenakan atas kepemilikan maupun pemanfaatan bumi dan bangunan, maka dari itu setiap kepemilikan atau pemanfaatan atas bumi dan bangunan wajib dikenakan pajak (Yakin & Amrulloh, 2018). Berdasarkan definisi tersebut disimpulkan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pemungutan pajak yang diperoleh dari bumi seperti tanah, perairan yang termasuk rawa dan tambak, serta laut dalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun bangunan yang terdiri dari konstruksi tetap pada tanah maupun perairan

5.3 Implikasi Terapan

- 1 Kepada Wajib Pajak atau Masyarakat diharapkan secara aktif dan tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan, serta masyarakat selaku wajib pajak diharapkan melaporkan perubahan alamat serta bangunannya kepada petugas agar petugas tidak mendapatkan kendala yang sama dan agar petugas saat melakukan pekerjaannya tidak terhambat dengan data yang tidak valid/ tidak sesuai dengan yang ada dilapangan.
- 2 Kepada para peneliti yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini disarankan agar lebih memperdalam unit analisisnya, baik variabel maupun indikator penelitian, sehingga dapat lebih mempertajam hasil yang sudah penulis peroleh di dalam penelitian ini.